



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

Telepon / Phone : 021-3150451, 3150455, 3908118-20 Fax : 62-21-3150457

Alamat Kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA

Email : pgi@cbn.net.id

**MASUKAN DAN REKOMENDASI UNTUK RDPU
PANITIA KERJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI**

I. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Namun sampai saat ini, alokasi 20 % dari APBN tersebut menyisakan banyak pertanyaan secara khusus bagi kepentingan pendidikan yang dikelola oleh swasta.

Pada tahun 2024, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 665 Triliun. Dari 2009 hingga 2024, total anggaran pendidikan yang sudah digelontorkan mencapai Rp 6.571,17 Triliun. Ada banyak pertanyaan kritis yang muncul, apakah pembiayaan program-program pendidikan yang dibuat sudah tepat sasaran? Apakah sudah berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan penduduk Indonesia secara keseluruhan? Bagaimana dengan kesenjangan akses pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Berapa besar dari 20% itu dialokasikan untuk pendidikan oleh pihak swasta?

Catatan penting lainnya, bahwa anggaran pendidikan tahun 2024 dialokasikan untuk berbagai instansi yang berhubungan dengan pendidikan. Di pemerintah pusat, anggaran pendidikan sebesar Rp 241,5 Triliun yang tersebar pada 24 kementerian/lembaga dan juga pada Bendahara Umum Negara. Tiga kementerian yang mendapatkan alokasi anggaran pendidikan tertinggi adalah Kemendikbud Ristek sebesar Rp 99 triliun, kemudian Kementerian Agama dengan alokasi anggaran sebesar Rp 62,3 triliun, dan Kementerian Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12 triliun.

Sesungguhnya perlu langkah-langkah strategis yang terperinci dan terukur serta perencanaan anggaran yang efektif, agar tercapai tujuan pengembangan pendidikan yang optimal. Alokasi anggaran haruslah mencerminkan prioritas. Pemerintah seharusnya memanfaatkan anggaran pendidikan untuk kebutuhan mendesak dari pendidikan seperti kekurangan sekolah, kekurangan guru, dan kesejahteraan guru, sehingga anggaran pendidikan benar-benar efektif untuk memajukan kualitas pendidikan. Perlu pengawasan dan evaluasi yang cermat terhadap penggunaan anggaran, untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan secara optimal. Juga masih terdapat kesenjangan dalam penyaluran anggaran, di mana daerah tertinggal dan terluar masih belum mendapatkan akses pendidikan yang tidak memadai, pun untuk pendidikan yang dikelola swasta belum terlalu jelas mekanisme dan alokasinya.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) saat ini memiliki 97 sinode anggota di mana sinode-sinode tersebut tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki Yayasan Pendidikan, sekolah-sekolah baik dasar menengah dan pendidikan tinggi. Keanggotaan gereja-gereja yang



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

Telepon / Phone : 021-3150451, 3150455, 3908118-20 Fax : 62-21-3150457

Alamat Kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA

Email : pgi@cbn.net.id

tergabung dalam PGI mewakili 80 persen umat Protestan di Indonesia. PGI juga terpanggil untuk menyuarakan keadilan bagi Pendidikan di Indonesia. Maka bersama *stakeholders* Pendidikan swasta yang berafiliasi dengan PGI, berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi penting untuk memberikan pandangan dan masukan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI.

II. Situasi Problematik Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan oleh swasta (sumber dan komponen kebutuhan)

Penyelenggaraan pendidikan baik oleh negeri maupun swasta sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Keduanya juga memiliki kewajiban yang sama yaitu akreditasi. Namun hak yang diterima dalam bentuk bantuan dari pemerintah sangat berbeda dan terkesan tidak adil di mana penyelenggara Pendidikan swasta sangat minim akses terhadap bantuan-bantuan pemerintah.

Neoliberalisasi ekonomi pendidikan terjadi secara massif, menjadi sangat *profit oriented*. PTN BH dan PT BLU mengalami privatisasi dan berorientasi profit. Akibatnya PTN melakukan penerimaan mahasiswa baru bergelombang-gelombang hingga penerimaan jalur mandiri. Akibat lanjutan, PTN ibarat, sebuah perusahaan yang melakukan produksi massal yang mengabaikan kualitas produk (kualitas PBM dan mahasiswa). Yang lebih parah ialah meningkatnya secara drastis uang kuliah tahunan dan biaya lainnya. Celaknya semua biaya ini ditanggung mahasiswa dan orang tuanya. Di sisi lain, keberadaan Universitas Terbuka yang juga menerima mahasiswa tanpa batas juga menimbulkan masalah bagi Universitas terbuka sendiri baik dalam pengelolaan mahasiswa dan proses belajar mengajar maupun juga dalam hal pertanggungjawaban bagi publik. Bagi PTS, situasi pengelolaan PTN dan Universitas Terbuka di atas ternyata memberikan dampak negatif lainnya berupa penerimaan mahasiswa baru yang menurun secara drastis. Jika situasi ini terus berlanjut dikuatirkan banyak PTS akan bangkrut.

Padahal PTS, sejauh ini telah berperan sangat aktif dalam meningkatkan APK (angka partisipasi aktif) PT. Pada tahun 2022 misalnya, APK PT sebesar 39.37% dimana dari jumlah ini, PTN menyumbang 25% dan PTS menyumbang 75%. Berdasarkan data ini, idealnya, APK sebaiknya menjadi fokus PTS sementara PTN biarlah berfokus pada peningkatan kualitas, peningkatan kualitas dan pemerinkatan dunia, serta berorientasi pada penelitian-penelitian dasar (fundamental) yang berorientasi paten dan nobel.

Perlu dipahami bahwa PTN, PTS, sekolah sekolah dari SD SMP dan SMU/K swasta dan negeri memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda, khususnya dalam hal pembiayaan. Dari berbagai *stakeholders* di PGI, maka komponen pembiayaan pendidikan mencakup, antara lain: Gaji & Restitusi kesehatan; Administrasi & Umum; Representasi; Kerumahtanggaan; Bahan Kuliah/Pengajaran; Kemahasiswaan; Pemeliharaan, perbaikan,



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

Telepon / Phone : 021-3150451, 3150455, 3908118-20 Fax : 62-21-3150457

Alamat Kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA

Email : pgi@cbn.net.id

Asuransi; Pengembangan Akademik non Akademik; Personalia/HRD; Iklan & Promosi; Akreditasi; Prasarana; Sarana.

Di luar biaya-biaya di atas, ternyata *sekolah-sekolah* dan PTS haurs menanggung juga biaya lainnya yang tidak ditemukan dalam pembiayaan negeri, antara lain: PBB, perpanjangan HGB, AMDAL dan biaya lainnya sebagaimana ditemukan dalam industri bisnis. Hal ini menyebabkan semakin mahalnya biaya operasional pendidikan. Seharusnya penyelenggara sekolah swasta perlu ditingkatkan bantuannya oleh pemerintah karena menanggung beban biaya yang cukup besar juga.

III. Penyampaian data dan pelaksanaan program bantuan Pendidikan oleh Pemerintah kepada swasta.

Sejauh ini beberapa PTS seperti Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Universitas Kristen Arta Wacana (UKAW), Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan sejumlah PTS Kristen lainnya seperti Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT), Universitas HKPB Nomensen, menerima bantuan pemerintah dalam bentuk :

- Dana sertifikasi dosen non PNS. Cukup memberikan tambahan bagi dosen PTS sesuai dengan jenjang jabatan fungsional
- Beasiswa KPI-K, Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)
- Beasiswa KIP yang dijatahkan oleh LLDIKTI (Kemenristekdikti)
- Hibah program sesuai dengan kategori (secara kompetisi)
- Hibah penelitian sesuai dengan kluster (secara kompetisi).
- Program pertukaran mahasiswa melalui ISMA (berdasarkan kompetisi)

Dari hasil FGD yang dilaksanakan PGI, salah seorang rector PTS di wilayah Indonesia Timur mengatakan bahwa, sebagian besar PTS di Indonesia Timur, tidak menerima bantuan sama sekali. Hampir semua pendidikan tinggi keagamaan yang ada dalam binaan Dirjen Bimas Kristen tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah.

IV. Usulan rekomendasi kebijakan dan regulasi pembiayaan Pendidikan untuk swasta

1. Perlu ditinjau kembali kebijakan privatisasi PTN melalui status PT BH dan PT BLU
2. Perlu penetapan pembatasan penerimaan mahasiswa baru oleh PTN yang bergelombang-gelombang, misalnya melauai Ujian nasional saja.
3. Perlu dihapusnya jalur penerimaan mandiri oleh PTN yang eksploitatif dan komersial dan berpotensi adanya suap dan korupsi.
4. Perlu adanya transparansi pengelolaan 20% dana pendidikan dari APBN, baik alokasi maupun mekanisme distribusinya, secara khusus alokasi untuk pihak swasta.



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

Telepon / Phone : 021-3150451, 3150455, 3908118-20 Fax : 62-21-3150457

Alamat Kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA

Email : pgi@cbn.net.id

5. Alokasi dana 20% dari APBN sebaiknya dikelola oleh Kemendikbud Ristek saja untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dengan demikian semua urusan pendidikan dalam kementerian yang lain harus menjadi tanggungjawab Kemendikbud Ristek.
6. Penyelenggara pendidikan swasta lebih banyak menampung siswa/mahasiswa, artinya sekolah swasta sebenarnya lebih banyak berperan mencerdaskan anak bangsa. Hal ini harus diselaraskan dengan pemberian dukungan kepada pihak swasta.
7. Pendidikan dasar dan menengah dalam klasterisasi-pembiayaan kurang menerima perhatian.
8. Pengalokasian jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk setiap kampus harus memiliki formula yang jelas. Sebaiknya kampus tertentu diberi keleluasaan dalam menyeleksi penerima KIP untuk efektifitas dan efisiensi proses.
9. Perlu transparansi distribusi dana KIP dan jangan sampai dana ini digunakan untuk kepentingan politik.
10. Pemerintah perlu membatasi daya tampung PTN bahkan UT sehingga tidak menimbulkan permasalahan bagi pihak swasta.
11. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah dasar dan menengah yang diterima sebuah sekolah sebaiknya diklasterisasi berdasarkan tinggi rendahnya uang sekolah. Bagi wilayah yang rata-rata uang sekolahnya relatif rendah karena kemampuan ekonomi masyarakatnya relatif rendah, sebaiknya menerima dana BOS yang relatif lebih besar.
12. Skema Pembiayaan Berbasis Kinerja:
 - Mengalokasikan sebagian dana pembiayaan berdasarkan capaian indikator kinerja perguruan tinggi swasta, seperti:
 - ⇒ Kualitas lulusan (IPK, masa studi, tingkat kelulusan)
 - ⇒ Publikasi ilmiah dan inovasi
 - ⇒ Tingkat keterserapan lulusan di lembaga pengguna lulusan (dalam hal ini gereja dan sekolah-sekolah Kristen, atau lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan karakteristik keilmuan TEOLOGI).
 - ⇒ Akreditasi dan peningkatan peringkat
 - ⇒ Memberikan bantuan finansial terukur yang dapat dimanfaatkan perguruan tinggi swasta dalam proses peningkatan kualitas.
 - ATAU memberikan bantuan operasional langsung melalui LL Dikti atau lembaga yang ditunjuk, yang setiap tahunnya anggaran tersebut berkisar 1M sd 50M berdasarkan status akreditasi (Unggul dan seterusnya dan *cluster* PTS, mandiri dan seterusnya) serta besar kecilnya PTS (bisa berdasarkan jumlah prodi dan jumlah mahasiswa).
 - Dengan kata lain, poin ini menekankan agar pemerintah mempertimbangkan ketersediaan insentif bagi PTS berdasarkan status akreditasi dan *clusternya* dan besar kecilnya PTS (bisa berdasarkan jumlah prodi dan jumlah mahasiswa).



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

Telepon / Phone : 021-3150451, 3150455, 3908118-20 Fax : 62-21-3150457

Alamat Kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA

Email : pgi@cbn.net.id

13. Insentif Pemerataan Akses:

- Memberikan insentif tambahan bagi perguruan tinggi swasta yang menyediakan beasiswa afirmatif atau program pembiayaan afirmatif lainnya untuk mahasiswa kurang mampu dan yang berprestasi.
- Memberikan insentif bagi perguruan tinggi swasta yang mampu memperluas akses pendidikan tinggi di wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjangkau.

14. Dukungan Riset dan Pengembangan:

- Mengalokasikan sebagian dana untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan di perguruan tinggi swasta, yang dianggap juga selaras dengan prioritas pembangunan nasional (manusia dan masyarakat).
- Alokasi dana ini juga berfungsi untuk mendorong perguruan tinggi swasta untuk lebih aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu-ilmu humaniora (misalnya, teologi, dll.).

15. Peningkatan Kualifikasi Dosen:

- Memberikan insentif bagi perguruan tinggi swasta yang meningkatkan kualifikasi dosen, seperti program beasiswa dosen yang studi lanjut.
- Memberikan insentif peningkatan kompetensi dan kualitas dosen dengan skema pembiayaan penelitian.

V. Usulan rekomendasi kebijakan dan regulasi pembiayaan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk swasta

1. Ketidaksetaraan dalam Regulasi Pendanaan Pendidikan :

Perlunya penambahan kuota Sekolah swasta Kristen terutama di daerah 3T sebagai penerima dana BOP PAUD dan dana BOS serta penambahan anggaran bagi sekolah swasta Kristen yang telah mendapatkan dana BOP PAUD dan BOS terutama sekolah swasta di daerah 3T. Hal ini sangat diperlukan bagi sekolah swasta Kristen terutama di daerah 3T, dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang memadai.

2. Regulasi yang Diskriminatif :

Perlunya perlakuan yang adil terkait beberapa regulasi pemerintah terhadap sekolah swasta Kristen, misalnya dalam hal persyaratan pengurusan izin mendirikan dan izin operasional sekolah, persyaratan akreditasi, kurikulum yang harus diikuti, atau pengangkatan guru swasta yang lulus program P3K agar dikembalikan ke sekolah asal.

3. Keterbatasan Akses ke Program Pemerintah:

Perlakuan pemberian akses yang sama kepada guru di Sekolah swasta Kristen dalam mengakses program-program pemerintah, seperti:

- a. Akses pemberian beasiswa kepada murid di sekolah swasta, misalnya PIP (Program Indonesia Pintar)



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA (PGI)

COMMUNION OF CHURCHES IN INDONESIA (CCI)

Jalan Salemba Raya No. 10, Jakarta Pusat (10430)

Telepon / Phone : 021-3150451, 3150455, 3908118-20 Fax : 62-21-3150457

Alamat Kawat / Cable Address OIKOUMENE JAKARTA

Email : pgi@cbn.net.id

- b. Akses program peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru, pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pembelajaran, seperti PMP (Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah), Program GGD (Guru Garis Depan), yaitu program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi guru di daerah 3T. PPG dan Program sertifikasi guru.
 - c. Akses untuk memperoleh beasiswa bagi guru, seperti beasiswa LPDP bidang pendidikan, program beasiswa microdential
 - d. Akses untuk mengikuti program pemberian dana insentif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, seperti tunjangan fungsional, tunjangan sertifikasi, tunjangan daerah tertinggal.
4. Ketidakpastian Hukum:
- a. Adanya ketidakpastian hukum terkait status dan keberlangsungan sekolah swasta Kristen karena sulitnya persyaratan pengajuan izin pendirian dan izin operasional sekolah
 - b. Perlunya perlakuan adil dalam memberikan bantuan hukum bagi guru di sekolah swasta Kristen dari pemerintah
5. Ketidakjelasan dalam Kebijakan Pajak:
- Perlunya peninjauan atas kebijakan pajak yang memberatkan bagi sekolah swasta Kristen

Demikian penyampaian rekomendasi PGI ini disampaikan kepada Komisi X DPR RI untuk dipertimbangkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan limpah terima kasih.

Jakarta, 22 Mei 2024
Teriring Salam dan Doa,
Atas nama MPH PGI



Pdt. Jacklevyn F. Manuputtu

Sekretaris Umum